

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans (Inggris: Harvard University Press, 1936)
- Friedman, Lawrence Meir. *American Law*, W. W. Norton & Company (Inggris: Oxford University Press, 1984).
- Harinie, Luluk Tri. *Hubungan Industrial*. (Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2024).
- Husni, Lalu. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian* (Banguntapan: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 1983).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori dan praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Suwanto. *Hubungan Industrial dalam Praktik* (Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003).
- Taneko, Soleman Bowo. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Yowana, I Made Adiwidya. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum Acara Perdata Indonesia (*Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R),  
terjemahan Niniek Suparni. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang  
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman Nomor SE/05  
Tahun 1983 tentang Pengangkatan Panitia Pengganti.

### **Jurnal**

Adhawiyah, Nur Febya & Imam Budi Santoso. “Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Yang Diputus  
Hubungan Kerja.” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. 6, No. 2, (2022),  
503.

Iskandar, Akbar Pahlevi. “Pelaksanaan Kewajiban Menyelesaikan Perkara Di  
Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Waktu Paling Lama 50 Hari (Studi  
Kasus Pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya).” *Jurnal Novum*,  
Vol 5, No. 1, (2018), 5–6.

Kesuma, I Nyoman Jaya & I Wayan Agus Vijayantera. “Perundingan Bipartit  
Sebagai Langkah Awal Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*,  
Vol. 2, No. 1, (2020), 77.

Martuali, H dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan  
Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera

- Selatan.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 4, No. 2, (2022), 115.
- Mashari. “Membangun Sistem Peradilan Hubungan Industrial Yang Berwibawa.” *Jurnal Ilmiah “DUNIA HUKUM”*, Vol 1, No. 1 (2016), 118.
- Pradipa, Arya. “Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court.” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, (2025), 196.
- Suandi, & Fitri Ida Laela “Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.” *Jurnal Krakatau*, Vol. 2, No. 2, (2024), 186.
- Wulandari, R. A., Muhammad Sukron & Raimon Efendi “Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya.” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2020), 61–71.
- Yunus, Yudin dkk. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2023), 731.
- Yusuf, Mohd dkk. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 4, (2025), 2870.

## **Website**

Satudata Kemnaker, “*Perselisihan yang Ditangani dan Diselesaikan oleh Mediator Tahun 2023*”, diakses 21 September 2025, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1648>

Satudata Kemnaker, “*Perselisihan yang Ditangani dan Diselesaikan oleh Mediator Tahun 2024*”, diakses 21 September 2025, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2341>

Satudata Kemnaker, “*Perselisihan yang Ditangani dan Diselesaikan oleh Mediator Tahun 2025*”, diakses 10 Februari 2026, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/3020>

Website Pengadilan Negeri Semarang, diakses pada 12 Maret 2026, <https://pn-semarangkota.go.id/live/hakim-adhoc-phi-2/>